

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam Peristiwa Krisis Ekonomi 1997, yang melanda hampir seluruh kawasan Asia Tenggara, Pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Chuan Leekphai dianggap gagal menangani krisis ini. Indikasi yang jelas terlihat adalah nilai tukar Bath terhadap USD yang sangat rendah mencapai 48 B/USD, ini dua kali lipat dari nilai tukar sebelum terjadi krisis, disamping adanya dugaan kuat akan kinerja pemerintahan yang korupsi, Ketidak mampuan PM Chuan Leekphai dalam mengatasi krisis ini, berdampak pada kekalahan dalam PEMILU 6 Januari 2001. Hasil yang diperoleh pesaing Chuan yang berasal dari Partai baru yaitu Patai THAI RAK THAI yang mencalonkan Thaksin Shinnawatra, mampu mendominasi hasil Pemilu dengan memperoleh 248 kursi dari 500 kursi yang ada di Parlemem Thailand, hasil ini mentasbihkan Thaksin Shinnawatra sebagai Perdana Menteri Thailand untuk pemerintahan 2001-2005.

Keinginan kuat akan adanya perubahan yang lebih baik, dan juga harapan akan terciptanya *Good Government*, yang sanggup mengangkat kembali perekonomian, keamanan dan stabilitas politik Thailand untuk lepas dari krisis yang ada, membuat para pemilih di Thailand berharap banyak pada isu perubahan dan perbaikan yang dibawa oleh Thaksin Shinnawatra, dan ini sedikit banyak terbukti dalam masa pemerintahannya, perekonomian Thailand menunjukkan kemajuan yang memuaskan, pemberantasan korupsi mulai di lakukan, stabilitas

politik mulai tercipta, keamanan secara nasional terjaga, namun Pemerintahan Thailand yang di pimpin oleh PM Thaksin Shinawatra bukan tanpa cacat. Penyelesaian pemberontakan di Thailand Selatan yang didominasi oleh warga Muslim semakin tidak jelas dan bahkan cenderung memburuk, peristiwa terbunuhnya 86 warga muslim di Narathiwat yang lebih dikenal sebagai tragedi Takbai, mencoreng kinerja pemerintahannya.

Dari semua raport yang di peroleh PM Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahan tahun 2001-2005, baik itu hasil positif seperti kemajuan ekonomi dan lain-lain maupun hasil negatif, seperti penyelesaian pemberontakan di kawasan Thailand Selatan yang semakin memburuk, tampak bahwa rakyat Thailand masih memiliki harapan besar pada Thaksin Shinawatra, ini di buktikan dengan terpilihnya kembali Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri Thailand untuk masa pemerintahan 2005-2009, berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul “ Faktor-faktor Terpilihnya Kembali Thaksin Shinawatra sebagai perdana menteri Thailand “.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor atau sebab-sebab terpilihnya kembali Thaksin Sinnawatra menjadi perdana menteri di Thailand untuk kedua kalinya.
2. Penulis ingin mencoba menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama perkuliahan untuk menemukan hipotesa-hipotesa yang relevan dalam menjawab semua permasalahan yang diajukan.

3. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang kesarjanaan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Masa jabatan Thaksin Shinawatra sebenarnya berakhir 5 Januari 2005, tapi pada kenyataannya Pemilihan Umum baru dilaksanakan pada 6 Pebruari 2005, ini sesuai dengan konstitusi Thailand yang memberikan jangka waktu paling lama 45 hari setelah jabatan Perdana Menteri berakhir Pemilihan Umum (pemilu) harus dilaksanakan. Pemilihan Umum di Thailand yang berlangsung 6 Pebruari 2005 tersebut menjadi arena untuk menguji kredibilitas kepemimpinan Thaksin Shinawatra, setelah selama empat tahun masa kepemimpinannya, Dimana gejolak kekerasan di Thailand selatan dengan korban nyawa manusia yang tidak sedikit, menjadi ganjalan yang tidak mudah.

Pasca tragedi kemanusiaan di Tak Bai, Pattani, yang menelan korban nyawa sekitar 80-an demonstran, Oktober tahun lalu, ada beragam pandangan terhadap kepemimpinan Thaksin Shinnawatra, baik pandangan politik domestik setempat maupun kritikan internasional karena dianggap menempuh cara-cara represif dalam menghadapi demonstrasi dengan tragedi ini, pihak Kerajaan Thailand pun turut menuai kritik karena dianggap tidak membuat pernyataan resmi atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinnawatra di Pattani, kecuali rasa belasungkawa atas korban

kemanusiaan itu, kondisi ini membuat pemerintahan Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinawatra tetap melanjutkan kebijakannya yang dianggap represif terhadap aktivitas warganya di tiga provinsi Thailand Selatan yang dilanda konflik, Pattani, Yala, dan Narathiwat yang mayoritas beragama Islam, Itulah sebabnya kenapa imbauan perdamaian dari Raja Bhumibol pada hari ulang tahunnya (5/12/04) untuk mengakhiri tindak kekerasan tetap disambut dingin oleh warga, khususnya di Thailand Selatan.

Selain itu, aktivitas ekonomi yang mulai hidup di daerah tersebut terutama dunia pariwisata, dalam setahun terakhir relatif lumpuh karena munculnya ancaman-ancaman keamanan yang banyak menghantui warga, selama tahun 2004 hingga Januari lalu, tercatat sekitar 570 orang terbunuh di daerah konflik dan belum mampu dinormalkan oleh pemerintahan Thaksin Shinawatra, kebijakan-kebijakan Thaksin Shinawatra dianggap kurang adil terhadap warga dan merembet memengaruhi kehidupan keagamaan antara penganut Islam dan penganut Buddha yang selama ini cukup baik. Bahkan, ketidakmampuan PM Thaksin Shinawatra menghentikan dengan segera tindak kekerasan di Thailand Selatan sempat membuat "ketegangan politik baru" dan menodai kebersamaan ASEAN dalam memerangi terorisme yang segera diprotes Kuala Lumpur dan Jakarta, ketika menuduh bahwa para militan Islam di Thailand Selatan mendapat latihan dan dikendalikan dari pemimpin yang ada di Malaysia dan Indonesia.

Ancaman dari " Front Pembebasan Pattani Bersatu " yang bersumpah akan membalas tragedi aksi unjuk rasa di Tak Bai terus menghantui pemerintah Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinawatra, sehingga aktivitas warga di

Thailand Selatan dikontrol sangat ketat dengan harapan konflik segera berakhir. Karenanya, banyak pengamat setempat menganggap kemungkinan rakyat di selatan Thailand tidak akan menggunakan hak pilihnya kali ini, ataupun dapat saja mengganggu proses pemilu, dan untuk memastikan keamanan dan kesuksesan pemilu, pemerintahan Thailand dibawah pimpinan PM Thaksin Shinawatra menggelar 10.000 tentara dan polisi di Thailand Selatan dalam menghadapi pemilu 6 Pebruari 2005.

Warga di Thailand Selatan tentu sangat ingin untuk mengganti kepemimpinan Thailand lewat Pemilihan Umum, mengingat sebelum rezim PM Thaksin Shinawatra belum pernah terjadi konflik vertikal antara warga dan pemerintah yang menelan korban begitu banyak, maupun konflik horizontal antar penganut Agama. Itulah sebabnya pasca tragedi Tak Bai - Pattani, berbagai upaya para politisi dari partai oposisi terus mencitra-negatifkan PM Thaksin Shinawatra dengan tujuan untuk menghentikan kekuasaannya pada Pemilihan Umum kali ini, namun harapan ini tampaknya sulit terwujud, mengingat posisi PM Thaksin Shinawatra masih dianggap cukup kuat¹.

Partai Thai Rak Thai, disimbolkan sebagai penentang neo-liberalisme, kemampuan ekonomi Thailand dibangun atas kontrol negara yang ketat, seluruh pembuatan kebijakan ekonomi terjaga akurat sehingga mampu memproteksi modal domestik melalui kontrak-kontrak sosial baru yang dapat mendorong perekonomian rakyat, kepemimpinan PM Thaksin Shinawatra diakui oleh banyak pengamat baik domestik maupun para analis ekonomi internasional, relatif

¹. Di tulis oleh Kevin Hewison, *Neo-Liberalism and Domestic Capital: The Political Outcomes of the Economic Crisis in Thailand* (Journal of Development Studies, 2005) Kompas, 5 februari 2005.

berhasil terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang sempat menghinggapi negara tersebut.

Kemampuannya dalam merancang dan membuat program strategis di sektor ekonomi dan mendorong ekspor, khususnya pengelolaan potensi pertanian melalui kebijakan deregulasi cukup berhasil, privatisasi perusahaan negara yang dilakukan juga terkontrol positif, demikian pula kemerosotan produktivitas sektor industri berhasil dipulihkan segera, walaupun masih banyak negara terus terpuruk dalam tujuh tahun terakhir, Thailand dianggap salah satu negara tercepat dalam memerdekakan diri dari terpaan krisis, PM Thaksin Shinnawatra sendiri adalah pengusaha terkaya di Thailand, ia bergerak di bidang telekomunikasi, memiliki hak monopoli dan dibesarkan oleh rezim militer yang memerintah sebelumnya. Ia juga pernah menjadi anggota pemerintahan koalisi yang dipimpin Ketua Partai Harapan Baru (*New Aspiration*), Chavalit Yongchaiyudh, yang terguling pada krisis finansial 1997 karena korupsi, kronisme, dan dianggap gagal membuka perekonomian bagi investor asing.

Sebagai orang yang diremehkan dan dilecehkan di awal masa pemerintahannya yang pertama, PM Thaksin Shinnawatra ternyata mampu membawa banyak perbaikan pada perekonomian dan bahkan terpilih kembali untuk kedua kalinya pada Pemilihan Umum Pebruari lalu, kini fenomena Thaksinomic (Resep kebijakan ekonomi ala Thaksin) membuat penasaran banyak orang, kendati di dalam negeri sejumlah media massa terkemuka menilai pemerintahannya sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintahan Thailand di bawah pimpinan PM Thaksin Shinawatra, tahun 2005, pasar modal Thailand menjadi *best performing stock market* di Asia, dengan indeks saham naik 135 persen. Tahun 2004 kedua terbaik setelah Indonesia, sebelumnya banyak pihak menduga pertumbuhan ekonomi Thailand akan "mentok" pada 2002, tetapi mereka keliru besar karena pertumbuhan terbukti terus meningkat hingga tahun lalu dengan pertumbuhan rata-rata di atas 8 persen per tahun selama masa pemerintahan Thaksin Shinawatra.

Mengapa negara-negara lain gagal tetapi Thailand berhasil?,² kuncinya adalah karena pemerintahan ini fokus ke kondisi ekonomi domestik melalui kebijakan-kebijakan yang pro-pertumbuhan, Thaksinomic dinilai sukses membawa kebijakan perekonomian Thailand yang sebelumnya lunglai, tanpa arah, serta tertekan "secara psikologis dan finansial", menjadi perekonomian paling bergairah di ASEAN.

Kebijakan pemerintahan Thailand dibawah kepemimpinan PM Thaksin Shinawatra yang, "konsentrasi pada hal-hal mendasar" difokuskan pada upaya mendorong permintaan dalam negeri, bukan melalui proyek-proyek mega atau memperbesar belanja pemerintah, tetapi dengan menyalurkan kredit dan dukungan lain ke sektor pedesaan dan usaha kecil dan menengah yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian.

Hasilnya konsumsi berhasil menjadi lokomotif perekonomian tiga tahun terakhir, dan separuh lebih dari penerimaan pajak diperoleh dari wilayah nonperkotaan, Thaksin Shinawatra sendiri dikenal memiliki visi masa depan

² Menurut analisis Jim Walker dalam *kajiannya di CLSA "Out and About" Newsletter*

Thailand yang sangat tegas. Salah satu ambisinya adalah mewujudkan pasar terintegrasi Indochina yang rencananya juga merangkul Provinsi Yunnan di China dengan Thailand sebagai pusat (Hubungan)-nya, semua ini menjadi indikator penilaian para analis politik dan berita-berita utama dari media setempat yang tetap mengunggulkan Partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin Shinnawatra untuk memenangkan Pemilihan Umum, Partai Thai Rak Thai ini masih jauh lebih populer di kalangan rakyat Thailand kalau dibandingkan program-program kebijakan yang ditawarkan oleh Partai Demokrat sebagai partai oposisi.

Apa yang dicitra negatifkan oleh pihak pesaingnya, oleh sebagian pengamat setempat dianggap tidak terlalu berarti memengaruhi perilaku pemilih, mengingat kinerja kabinet Thaksin Shinnawatra selama menjabat PM di Thailand dianggap cukup baik. Selain itu, dengan latar belakang sebagai konglomerat multimedia, Thaksin Shinnawatra relatif mampu mengontrol berita-berita di media cetak dan elektronik di negeri itu, Thaksin Shinnawatra banyak membuat program-program pelayanan pemerintahan dan pembangunan menjelang Pemilihan Umum yang cukup menguntungkan kepentingan politiknya, termasuk dalam penanganan korban bencana ombak tsunami yang menelan ribuan korban manusia di Thailand, relatif dianggap cepat dan berhasil oleh warga setempat.

Itulah sebabnya, gejolak konflik di Thailand selatan ataupun mungkin aspirasi di tiga provinsi yang dilanda konflik untuk mengganti rezim Thaksin Shinnawatra, tampaknya belum akan terwujud pada pemilu kali ini. Mengingat indikator-indikator politik yang dapat mengantar suatu kemenangan politik dalam pemilu masih terenggam erat di tangan Thaksin Shinawatra bersama partainya,

Thai Rak Thai (Thai Cinta Thai), terlebih lagi warga pemilih di Thailand selatan dianggap tidak cukup signifikan dalam memengaruhi hasil pemilu mendatang.

D. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang muncul dan diangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah: “Mengapa Thaksin Shinawatra bisa terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Thailand untuk yang kedua kali, padahal citra Thaksin sangat merosot sebelum menjelang pemilu? “

E. Landasan Konseptual

Seperti sudah menjadi kelaziman bahwa dalam suatu penciptaan karya ilmiah, konsep atau teori memegang peranan yang sangat penting. Konsep atau teori merupakan bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu itu terjadi, sehingga selain digunakan sebagai eksplanasi juga sebagai dasar prediksi, landasan konsep yang digunakan penulis untuk menganalisa permasalahan yang di ajukan dalam penulisan ini adalah :

Konsep Kewenangan Dan Legitimasi

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan, kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.³

1.1 Sumber Kewenangan

Setiap orang yang mempunyai hak untuk memerintah selalu menunjukkan sumber haknya, menurut Charles F. Andrain, sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan sebagai berikut:⁴

Pertama, hak memerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat.

Kedua, hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu, atas dasar itu, hak memerintah dianggap bersifat sakral, orang yang berkuasa berusaha menunjukkan kepada khalayak, kewenangannya memerintah masyarakat berasal dari kekuatan yang sakral.

Ketiga, hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun kerana memiliki kharisma.

Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosodur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Peraturan perundangan- undangan yang dimaksud antara lain, konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah.

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT . Grasindo, Jakarta, 1992, hal 85

⁴ Charles F. Andrain, *Political Life and Sosial Change: An Introduction to Political Sciene*, dalam *Ibid*, hal.86

Kelima, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan, keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan yang dimaksud ialah pemilikan uang, tanah, barang-barang berharga, sarana, dan alat produksi, hal ini didasarkan asumsi keahlian diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan yang mampu mencapai tujuan orang yang memiliki keahlian. Orang kaya akan dapat menjalankan pemerintahan bukan untuk kepetingan sendiri karena ia sudah menikmati kepuasan dari kekayaannya, tetapi untuk masyarakat umum.

Pada landasan konseptual yang digunakan untuk menjawab permasalahan maka bisa kita mengaitkan dengan permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu; pada poin yang *ketiga*, hak memerintah yang berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin yaitu Thaksin Shinnawatra, baik itu penampilannya yang agung, diri pribadinya Thaksin yang sangat populer dan kharisma yang ia miliki. Pada poin yang *keempat*, hak memerintah masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah, pada pemilihan umum 6 Pebruari 2005 lalu partai yang dipimpin oleh Thaksin menang dalam pemilu tersebut dengan mendapatkan kursi di parlemen 377 kursi dari jumlah 500 kursi, sehingga membuat ia bisa kembali memimpin pemerintahan Thailand sebagai Perdana Menteri untuk empat tahun lagi, sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dan untuk poin yang *kelima*, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan, keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan yang dimaksud ialah pemilikan

uang, tanah, barang-barang berharga, sarana, dan alat produksi. Disini bisa kita kaitkan dengan Thaksi bahwa ia adalah salah satu orang yang miliki prestasi pada masa pendidikan yang mencapai S3, dan ia juga adalah orang yang berhasil dibidang bisnis sehingga membuat ia sudah memiliki kekayaan dan sudah menikmati kepuasan dari kekayaan. Maka ia dapat menjalankan kebijak pemerintahan bukan untuk kepetingan sendiri tetapi untuk masyarakat umum.

2. Legitimasi

Legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dan yang di pimpin, konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan artinya, Apakah masyarakat menerima atau mengakui hak moral pemimpin untuk membuat atau melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak?, apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan berlegitimasi, maksudnya legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.⁵

2.1 Cara mendapatkan Legitimasi

Cara-cara yang di gunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu: simbolis, procedural, dan materiil. *Pertama*, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral,

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta 1992, hal 92

emosional, tradisi, dan kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol, penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi cenderung bersifat ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar, contohnya: upacara kenegaraan yang megah, parade militer, penganugerahan tanda-tanda kehormatan dan penghargaan, dan lain-lain.

Kedua, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Penggunaan metode prosedural atau pemilihan umum berlangsung mulai dari calon tunggal sampai dengan calon persaingan bebas, dan mulai dari yang bersifat umum, langsung rahasia serta jujur dan adil (*fair*) sampai dengan penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Bagi sementara sistem politik, penyelenggaraan pemilihan umum dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahannya memiliki legitimasi.

Ketiga, dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil, kepada masyarakat seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan modal yang memadai.

Dengan mengetahui konsep kewenangan dan legitimasi, maka dapat di jelaskan bahwa Thaksin Shinnawatra dari partai Thai Rak Thai dapat berkuasa kembali di Thailand karena mempunyai kewenangan yang merupakan kekuasaan

yang memiliki keabsahan (kemenangan pemilu 2005). Sumber kewenangan Thaksin Shinnawatra berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer, maupun karena memiliki kharisma. Thaksin Shinnawatra mempunyai kualitas yang di nilai rakyat Thailand mampu untuk memimpin negaranya empat tahun kedepan, dan Thaksin Shinnawatra sendiri cukup populer di berbagai kalangan terutama pendukung setiannya, seperti kaum pemuda, mahasiswa, dan pekerja.

Dan juga Thaksin Shinnawatra mempunyai kharisma yang lebih kalau di bandingkan dengan lawan politiknya dari partai Demokrat, yaitu Ban-yat Bantadsthan, sumber kewenangan lainnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan, bahwa Thaksin Shinnawatra menjadi PM Thailand karena diatur dalam undang-undang yang menyatakan bahwa partai pemenang dalam pemilu akan memimpin Thailand. Peralihan kewenangan di Thailand dengan cara pemilihan yang dilakukan secara langsung melalui parlemen, sedangkan sikap masyarakat Thailand terhadap kewenangan PM Thaksin Shinnawatra, dapat menerima karena di nilai masih menjunjung tinggi nilai kehormatan dan martabat pribadi.

Untuk legitimasi, partai Thai Rak Thai mendapat legitimasi dari rakyat Thailand, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang mau mengakui dan menerima hak moral pemimpin (Thaksin Shinnawatra) untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, namun untuk objek legitimasi, masih ada

upaya separatisme di komunitas politik yaitu di Thailand Selatan yang ingin memisahkan diri dari Thailand. Kadar legitimasi di Thailand mempunyai hubungan kewenangan yang berlegitimasi, karena rakyat mengakui dan menerima hak moral penguasa (Thaksin Shinnawatra) untuk memerintah, cara mendapatkan legitimasi, Thaksin Shinnawatra menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi. Kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha dan modal yang memadai, tipe legitimasi yang berlaku di Thailand yaitu: legitimasi kualitas pribadi: Thaksin Shinnawatra, ia mempunyai kualitas pribadi berupa kharisma dan penampilan pribadi, legitimasi prosedural: Thaksin Shinnawatra, mendapat kewenangan menurut prosedur yang di terapkan dalam peraturan perundang-undangan dan legitimasi instrumental: Thaksin Shinnawatra, menjanjikan kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Basis Partai

Partai berdiri diatas suatu basis sosial tertentu, dengan demikian dukungan sosial partai ditentukan atau dipengaruhi oleh kepentingan yang sama atau berbeda, kepentingan yang sama akan mendorong sikap, pilihan dan tindakan politik yang sama.

Menurut Agus Campbell, ada tiga variable utama yang berpengaruh pada perilaku individu dalam memilih suatu partai.⁶ Ketiga variable tersebut adalah:

1. Identifikasi terhadap partai

Secara psikologis individu memilih suatu partai karena adanya rasa kesetiaan dan cintanya pada partai, sikap ini bisa ditunjukkan dengan slogan-slogan seperti kami adalah X atau kami adalah Y yang mengidentifikasi bahwa mereka adalah pendukung setia suatu partai.

2. Isu yang sedang berkembang

Dengan pertimbangan ini, individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan kelayakan dan selain itu, kesanggupan dari partai ini ditentukan oleh isu yang berkembang saat ini.

3. Orientasi terhadap calon (Kandidat)

Individu memilih suatu partai karena kualitas personal kandidat tanpa memandang pada partai yang mendukungnya atau pada isu yang berkembang, perilaku ini terbagi menjadi dua: *pertama*, kualitas instrumental dimana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah tertentu dan *kedua*, kualitas simbolis dimana pemilih mempunyai pandangan bagaimanakah seharusnya pemimpin yang baik seperti misalnya harus jujur, baik hati, sederhana dan sebagainya, merujuk pada kriteria diatas maka dapat disebutkan beberapahal

⁶ Agus Campbell, "The American Voters, John Willy and Son New York" dalam Bone and Ranney, *Politics and Voters*, McGraw-Hill book Company, New York, 1963, hal 8-13

yang menjelaskan kemenangan Partai Thai Rak Thai di Thailand pada pemilu tahun 2005.

Faktor pertama, identifikasi terhadap partai.

Sebagai partai baru, Partai Thai Rak Thai (Thai Cinta Thai) mencari dukungan seluas mungkin dari masyarakat Thailand yang sangat majemuk, Partai Thai Rak Thai dibangun atas dasar nasionalisme yang berwatak membawa perubahan revolusioner demi masa depan yang lebih baik, dan partai Thai Rak Thai yang bergabung dengan beberapa partai politik di Thailand sehingga membuat partai Thai Rak Thai sangat kuat dalam pemilu 2005 dibandingkan dengan partai Demokrat Yang terdiri dari satu partai, maka dukungan diperoleh dari hampir seluruh kalangan masyarakat di Thailand, Karena sudah terbukti oleh masyarakat Thailand bahwa partai Thai Rak Thai pada periode pertama yang dipimpin oleh Thaksin Shinawatra, sudah membuat perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat di Thailand.

Faktor kedua, isu yang sedang berkembang.

Thailand pada zaman dahulu masalah gerakan separatis di Thailand Selatan selalu membuat kesulitan bagi pemerintahan Thailand disetiap zaman, hal itu juga dirasakan oleh pemerintahan Thaksin Shinawatra pada periode pertama, yang dianggap gagal oleh lawan politiknya dan masyarakat di Thailand selatan dalam menagnani masalah tersebut. Sudah banyak korban jatuh sakit atau meninggal dunia karena cara yang digunakan oleh Thaksin Shinawatra dalam

menghadapi masalah tersebut tidak mendapatkan hasil yang positif, tetapi hal ini tidak mempengaruhi partai Thai Rak Thai karena pada masyarakat Thailand yang mayoritas beragama Buddha sudah meanggap masalah gerakan separtis ini adalah masalah klasik dan PM Thaksin Shinnawatra sendiri sudah membuat hal yang terbaik untuk menangani masalah tersebut.

Faktor ketiga, orientasi terhadap calon (Kandidat)

Pada Pemilu 2005, partai Thai Rak Thai mempunyai calon (kandidat) yang kuat dan sangat dikenal rakyat yaitu Thaksin Shinnawatra, Perdana Menteri Thailand yang ingin mencalonkan untuk yang kedua kalinya, sedangkan dari Partai Demokrat, calon yang diunggulkan yaitu Ban-yat Bantadsthan, pimpinan Partai Demokrat. Ban-yat menggantikan Chuan Leekphai yang dikalahkan oleh Thaksin Shinnawatra pada pemilu 2001, namun dalam hal ini Ban-yat tidak memiliki kharisma seperti Thaksin, Ia dinilai terlalu biasa dan tidak meyakinkan, bahkan menurut jajak pendapat media setempat Ban-yat sendiri dinilai tidak cukup kuat dan tidak menunjukkan citra yang baik sebagai pemimpin.

F. Hipotesa

Thaksin shinnawatra bisa terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Thailand untuk yang kedua kali, padahal citra Thaksin Shinnawatra sangat merosot sebelum menjelang pemilu, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Keberhasilan Thaksin Dalam Menangani Krisis Ekonomi di Periode Pertama

2. Keberhasilan Thaksin Shinawatra dalam memperkuat partai Thai Rak Thai dengan bergabungnya partai politik yang lain.
3. Karakter keras dan tegas dari Thaksin Shinawatra dalam membuat kebijakan untuk menangani masalah yang ada di Thailand, sehingga muncul kharisma tersendiri bagi rakyat Thailand

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai suatu keharusan dari sebuah penulisan maka di butuhkan batasan-batasan waktu yang jelas dalam masa peninjauan penelitian, Jangkauan waktu penelitian ini dimulai dari masa sebelum pemilu 6 Pebruari 2005 (masa pemerintahan Thaksin Shinnawatra 2001-2005) dan saat pemilu tersebut di langsunkan (6 pebruari 2005-pelantikan Thaksin Shinnawatra sebagai PM Thailand)

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atas berbagai literature, yang relevan dengan penulisan, selain itu didukung juga oleh berbagai data dari surat kabar, majalah, jurnal, internet dan dokumen-dokumen resmi yang memuat informasi tentang Negara Thailand, Partai Thai Rak Thai, Pemilihan Umum di Thailand dan hal-hal yang ber kaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi dalam 5 bab:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan konseptual, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan.

Bab *Kedua*, akan membahas tentang latar belakang Pendidikan Thaksin Shinnawatra, keberhasilan Thaksin Shinnawatra di bidang Bisnis, dan perjalanan karir Politiknya Thaksin Shinnawatra di Thailand

Bab *Ketiga*, akan memberikan deskripsi masa pemerintahan Thaksin Shinnawatar pertama (2001 -2005), keberhasilan yang sudah tercapai, kendala-kendala yang dihadapi, kemerosotan citra Thaksin, dan kemenangan kembali Partai Thai Rak Thai

Bab *Keempat*, akan membahas faktor-faktor kemenangan Partai Thai Rak Thai dalam Pemilihan Umum 2005, faktor keberhasilan Thaksin dalam menangani krisis ekonomi, komposisi partai Thai Rak Thai yang lebih kuat dibandingkan dengan partai Demokrat, dan Karakter keras dan tegas dari Thaksin yang terbukti efektif dalam menangani beberapa krisis yang melanda Thailand, yang pada akhirnya memunculkan kharisma tersendiri bagi etnis Thailand.

Bab *Kelima*, bab ini merupakan rangkuman atau kesimpulan dari permasalahan yang ada sehingga menjadi suatu bentuk kesimpulan yang singkat dan jelas sehingga mampu menjawab pokok permasalahan yang ada.